



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUH NASIRUDDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **713153**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.300.500.000

1. Tanah Seluas 754 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.500.000
2. Tanah Seluas 1469 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 1558 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.500.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC S5A MT / VTI - S Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z/30 C CW Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 50C T135HC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOTOR, YAMAHA 4DF VEGA R Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 171.500.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.556.500.000
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.526.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.